

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

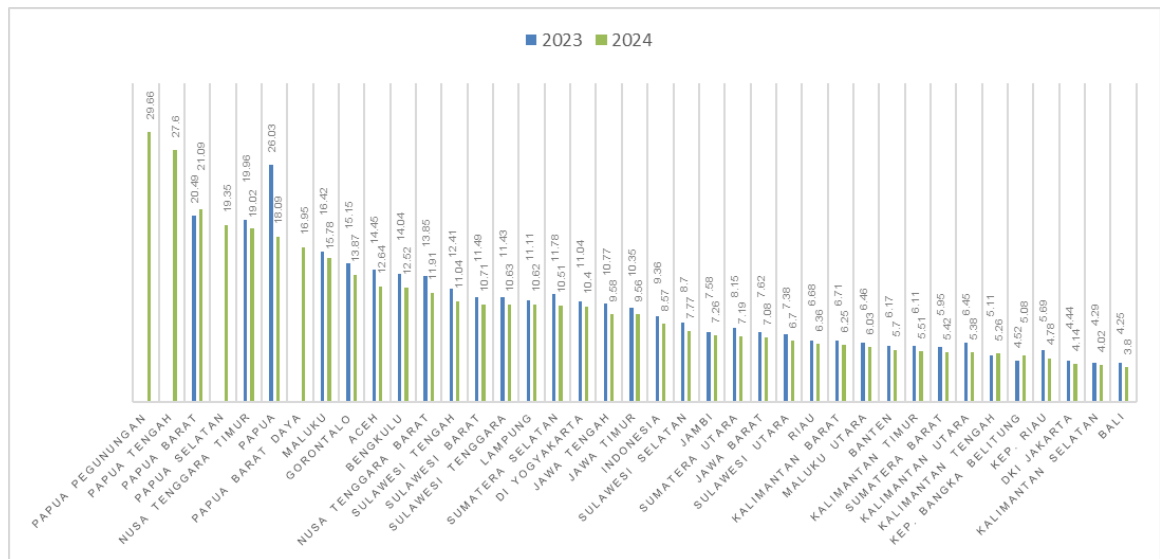
Kemiskinan merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi karena mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara langsung. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, kemiskinan dipahami sebagai kondisi ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi standar hidup layak akibat keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan (Kuncoro, 2018; Alkire et al., 2018). Oleh karena itu, tingkat kemiskinan tidak hanya merepresentasikan persoalan pendapatan, tetapi juga mencerminkan rendahnya kualitas kapabilitas manusia yang berimplikasi pada keberlanjutan pembangunan jangka panjang (UNDP, 2020).

Berbagai studi menegaskan bahwa dinamika kemiskinan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia dan kinerja ekonomi daerah (Todaro & Smith, 2020; Suprayitno, 2024). Keterbatasan kualitas kesehatan dan rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat dapat memperlemah kapasitas produktif, sehingga meningkatkan kerentanan rumah tangga untuk jatuh ke dalam kemiskinan atau tetap berada dalam kondisi miskin. Dengan demikian, kemiskinan lebih tepat dipahami sebagai outcome dari interaksi berbagai faktor struktural, khususnya kondisi kesehatan masyarakat dan dinamika pertumbuhan ekonomi.

Pendekatan pengukuran kemiskinan berbasis kebutuhan dasar yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa fluktuasi tingkat

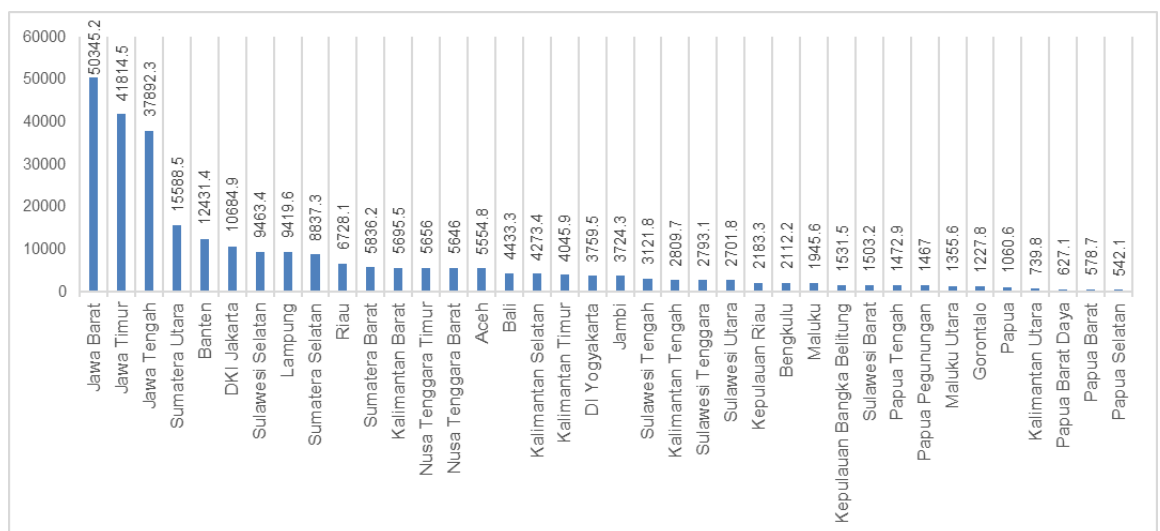
kemiskinan sangat dipengaruhi oleh dinamika harga, kondisi pasar tenaga kerja, dan ketahanan ekonomi rumah tangga (BPS, 2021; BPS, 2023). Ketahanan ekonomi rumah tangga menjadi salah satu faktor krusial dalam menjelaskan dinamika kemiskinan, karena rumah tangga dengan keterbatasan tabungan, akses pembiayaan, dan jaminan sosial cenderung lebih rentan mengalami penurunan kesejahteraan ketika menghadapi guncangan ekonomi, seperti kehilangan pekerjaan atau penurunan jam kerja (World Bank, 2021). Pengalaman selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa guncangan ekonomi yang bersifat sementara pun dapat mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin apabila ketahanan ekonomi rumah tangga relatif lemah.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan bersifat dinamis dan rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi makro, sehingga tidak dapat dipahami semata-mata sebagai fenomena statis yang hanya mencerminkan tingkat pendapatan pada satu titik waktu tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa kemiskinan tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan berbagai variabel ekonomi dan sosial, termasuk kondisi kesehatan dan dinamika pertumbuhan ekonomi (UNDP, 2020; OECD, 2019). Dalam konteks Indonesia, perbedaan kondisi ekonomi dan sosial antarprovinsi menyebabkan tingkat dan dinamika kemiskinan menunjukkan variasi secara regional, sehingga analisis pada tingkat provinsi menjadi relevan untuk dilakukan (World Bank, 2020; BPS, 2023).



Gambar 1.1 Tingkat Kemiskinan Menurut Provinsi Tahun 2023 dan 2024

Sumber: BPS (2024)



Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Menurut Provinsi Tahun 2024

Sumber: BPS (2024)

Berdasarkan gambar 1.1, terlihat bahwa tingkat kemiskinan antarprovinsi di Indonesia pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan perbedaan yang cukup jelas. Beberapa provinsi menunjukkan adanya penurunan tingkat kemiskinan dan beberapa provinsi lainnya justru menunjukkan adanya kenaikan tingkat

kemiskinan. Selain itu, beberapa provinsi mencatat tingkat kemiskinan di atas angka nasional, sementara sebagian provinsi lainnya berada di bawah angka nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian penurunan kemiskinan secara nasional belum tercermin secara merata di seluruh wilayah. Dalam konteks tersebut, Jawa timur merupakan salah satu provinsi yang tingkat kemiskinannya berada di atas angka nasional pada tahun 2023 dan 2024.

Lebih lanjut, posisi Jawa Timur dalam konteks kemiskinan nasional menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan jumlah penduduknya. Berdasarkan gambar 1.2, Jawa Timur tercatat sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, bahkan berada pada peringkat 2 teratas secara nasional. Besarnya jumlah penduduk ini secara langsung berimplikasi pada besarnya jumlah penduduk miskin secara absolut, meskipun persentase kemiskinan tidak selalu menjadi yang tertinggi. Dengan kata lain, tingkat kemiskinan yang relatif lebih tinggi dari angka nasional, ketika dikombinasikan dengan jumlah penduduk yang besar, menjadikan Jawa Timur sebagai salah satu kontributor utama terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Salah satu faktor struktural yang berpotensi memengaruhi tingkat kemiskinan adalah kondisi kesehatan masyarakat, khususnya prevalensi stunting. Menurut WHO (2024), stunting adalah kondisi anak yang mengalami tinggi badan rendah (low height-for-age), yaitu berada lebih dari dua standar deviasi di bawah median dari *WHO Child Growth Standards*. Kondisi ini merupakan akibat dari kekurangan gizi kronis atau berulang serta infeksi berkepanjangan selama periode penting pertumbuhan awal (1000 hari pertama). Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga menurunkan kapasitas kognitif dan produktivitas

individu di masa depan, anak-anak yang mengalami stunting gagal mencapai potensi fisik dan mental mereka secara penuh, yang pada akhirnya berimplikasi pada kemampuan ekonomi dan kesejahteraan rumah tangga (UNICEF, 2019).

Tingginya prevalensi stunting dapat memperlemah kualitas modal manusia dan menurunkan produktivitas tenaga kerja, sehingga berpotensi meningkatkan risiko kemiskinan, baik pada tingkat individu maupun agregat. Rumah tangga dengan anggota keluarga yang mengalami stunting cenderung menghadapi keterbatasan kapasitas ekonomi dalam jangka panjang akibat rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan (WHO, 2018; UNICEF, 2020). Penelitian Kurniawan dan Sari (2020) menunjukkan bahwa prevalensi stunting memiliki pengaruh kausal jangka panjang terhadap tingkat kemiskinan. Selain itu, penelitian empiris di tingkat daerah juga memperkuat temuan ini, dimana stunting lebih banyak terjadi pada komunitas dengan tingkat kemiskinan tinggi (Nugroho & Wulandari, 2021). Dengan demikian, prevalensi stunting tidak hanya dipandang sebagai persoalan kesehatan, tetapi juga sebagai faktor yang berpotensi memengaruhi tingkat kemiskinan.

Tabel 1.1 Data Perbandingan Prevalensi Stunting dan Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi lainnya di Indonesia

Provinsi	2019		2020	
	Prevalensi Stunting (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Prevalensi Stunting (%)	Tingkat Kemiskinan (%)
Jawa Timur	26.86	10.37	25.64	11.09
Bali	14.3	3.79	10.9	3.78
Kepulauan Bangka Belitung	19.9	4.62	4.63	4.53

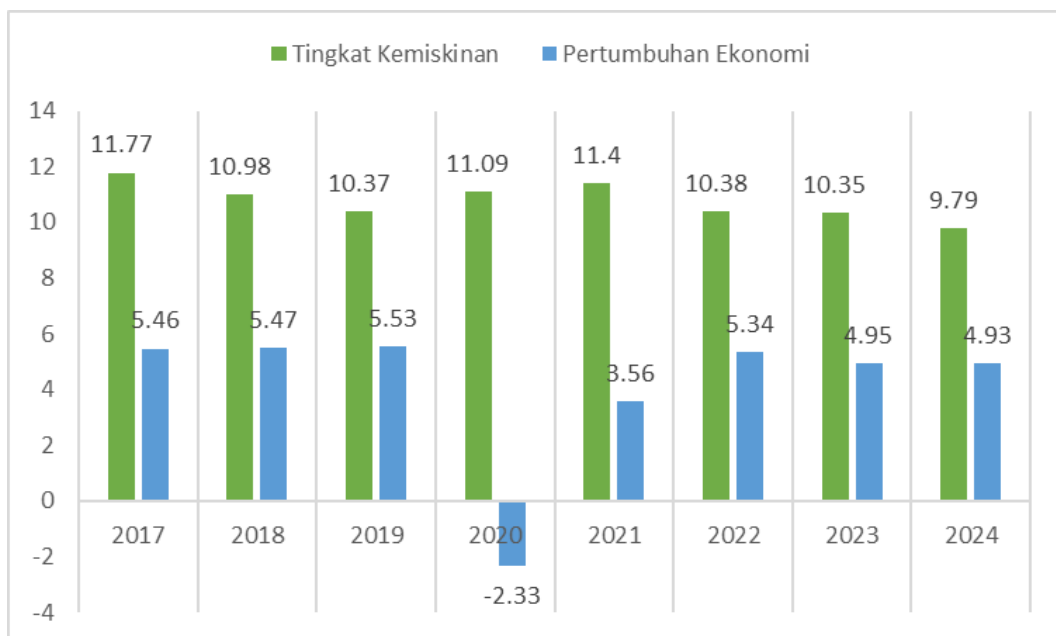
Sumber: Data BPS diolah peneliti (2024)

Teori Modal Manusia (Human Capital Theory) menyatakan bahwa kualitas

kesehatan dan gizi merupakan komponen fundamental dalam pembentukan modal manusia yang menentukan produktivitas individu dan pendapatan sepanjang siklus hidup (Schultz, 1961; Becker, 1964). Dalam konteks agregat, tingginya prevalensi stunting menurunkan kualitas tenaga kerja suatu daerah, sehingga menghambat peningkatan pendapatan masyarakat dan berkontribusi terhadap tingginya tingkat kemiskinan (Becker, 1964; Todaro & Smith, 2020). Selain itu, hubungan tersebut juga dijelaskan melalui Teori Poverty Trap (jebakan kemiskinan) yang menyatakan bahwa rendahnya kualitas kesehatan dan gizi dapat menciptakan lingkaran kemiskinan yang bersifat antargenerasi (Nurkse, 1953). Dalam hal ini berarti, jika prevalensi stunting meningkat, maka tingkat kemiskinan juga meningkat. Tabel 1.1 menunjukkan bahwa kenyataan kondisi yang ada di Jawa Timur, prevalensi stunting di Jawa Timur pada tahun 2020 mengalami penurunan, namun tingkat kemiskinan justru mengalami peningkatan. Hal ini berbeda dengan beberapa provinsi lain yang memiliki angka prevalensi stunting di bawah Jawa Timur, penurunan prevalensi stunting diikuti dengan penurunan angka tingkat kemiskinan.

Selain faktor kesehatan, pertumbuhan ekonomi juga merupakan determinan penting dalam menjelaskan perubahan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif berpotensi menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, sehingga menurunkan tingkat kemiskinan (Todaro & Smith, 2020). Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang lambat atau tidak merata dapat membatasi penurunan kemiskinan. Penelitian panel data di Indonesia menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dan prevalensi stunting memiliki kausalitas terhadap tingkat kemiskinan dalam jangka panjang, di mana pertumbuhan ekonomi

cenderung mengurangi level kemiskinan meskipun efeknya dipengaruhi oleh konteks struktural wilayah (Kustanto, 2021). Selain itu, studi serupa yang menggunakan pendekatan VECM menunjukkan bahwa aritmetika hubungan kausal mengalir dari pertumbuhan ekonomi dan stunting ke tingkat kemiskinan, dengan kontribusi pertumbuhan ekonomi relatif dominan dalam menurunkan kemiskinan dalam jangka panjang (Sari et al., 2020–2023).



Gambar 1.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2024

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa pada kenyataannya hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur pada tahun tertentu justru menunjukkan hubungan yang berbeda dengan teori. Dimana kenaikan pertumbuhan ekonomi diikuti juga dengan kenaikan tingkat kemiskinan. Di tahun lainnya menunjukkan penurunan pertumbuhan ekonomi diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan.

Dari penjelasan di atas, pemahaman mengenai kemiskinan perlu ditempatkan

dalam kerangka yang lebih luas sebagai bagian dari sistem pembangunan yang saling terkait, di mana perubahan pada variabel ekonomi dan kesehatan dapat memicu dampak pada kemiskinan. Dinamika kemiskinan yang berbeda antarwilayah juga menunjukkan pentingnya kajian pada tingkat regional untuk memperoleh pemahaman yang lebih spesifik mengenai karakteristik dan implikasinya. Selain itu, adanya pola hubungan yang tidak sejalan dengan teori mengindikasikan adanya gap yang perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu penelitian mengenai kausalitas prevalensi stunting dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kausalitas jangka panjang dan jangka pendek prevalensi stunting terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur tahun 2017-2024?
2. Bagaimana kausalitas jangka panjang dan jangka pendek pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur tahun 2017-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kausalitas jangka panjang dan jangka pendek prevalensi stunting terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur tahun 2017-2024
2. Untuk mengetahui kausalitas jangka panjang dan jangka pendek pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur tahun 2017-2024

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur di bidang ekonomi pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan kausalitas prevalensi stunting dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan. Pengujian yang dilakukan juga dapat memperkuat basis teori yang menghubungkan indikator-indikator ekonomi makro dengan outcome sosial berupa stunting.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti mengenai kausalitas prevalensi stunting dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain yang meneliti masalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kemiskinan di masa yang akan datang secara lebih efektif dan efisien, serta diharapkan dapat menjadi implikasi yang penting bagi para pengambil kebijakan, pelaku pembangunan, dan pihak-pihak terkait dalam penanggulangan masalah kemiskinan di Jawa Timur.